PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PADI DI KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR

(Rice Agribusiness Development In Indrapuri Subdistrict, Aceh Besar)

Syahrul Ramadhan¹, Agustina Arida¹, Agussabti^{1*}

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala

Abstrak - Pengembangan agribisnis merupakan serangkaian pembangunan industri dan pertanian serta jasa yang sekaligus juga dilakukan secara simultan dan harmonis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kendala apa saja pada subsistem agroinput, agroproduksi, agroindustri, agroniaga, dan penunjang dalam pengembangan usahatani padi di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan agribisnis padi belum optimal. Hal ini ditandai dengan adanya kendala dalam masing-masing subsistem agribisnis. Beberapa diantaranya adalah harga benih dan pupuk subsidi yang tinggi, serta kelangkaan terhadap pupuk subsidi.

Kata kunci : Pengembangan Agribisnis, Petani, Subsistem Agribisnis.

Abstract - Agribusiness development is a series of industry, agriculture and services development performed simultaneously and harmoniously as well. The purpose of this study was to determine any constraints on subsystems included agro-input, agro-production, agro-industry, agro-commerce, and rice farming development support in Indrapuri subdistrict, Aceh Besar. The data was analyzed using qualitative and quantitative methods. The results of this study indicated that the rice agribusiness development is not optimal. It is characterized by the presence of obstacles in each subsystem of agribusiness. Some of them are highly subsidized seed and fertilizer prices and the scarcity of the subsidized fertilizer.

Keywords: Agribusiness Development, Farmers, Agribusiness Subsystems.

PENDAHULUAN

Pengembangan tanaman pangan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional. Peranannya bukan saja terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional. Disisi lain, tantangan internal sektor ini patut menjadi perhatian, antara lain stagnasi pertumbuhan produktivitas, penurunan insentif usahatani, dan persaingan yang kurang fair dengan produk impor. Untuk menjawab tantangan tersebut, telah dilakukan reorientasi kebijakan dan program pembangunan yang lebih dititik beratkan kepada pemberdayaan petani untuk mengembangkan system dan usaha agribisnis secara berkelanjutan dan berdaya saing (Departemen Pertanian, 2004).

Pengembangan agribisnis di Indonesia merupakan bagian yang sangat penting dalam membantu proses pembangunan ekonomi dan peningkatankesejahteraan masyarakat. Secara umum, pengembangan agribisnis merupakan serangkaian pembangunan industri dan pertanian serta jasa yang sekaligus juga dilakukan secara simultan dan harmonis. Secara keseluruhan

dapat diartikan bahwa perkembangan pertanian, industri dan jasa harus saling berkesinambungan dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sebagai implikasi dari pengembangan ini diharapkan pembangunan subsistem agribisnis ini dapat berjalan sekaligus untuk memenuhi program pengembangan agribisnis sebagaimana mestinya.

Salah satu komoditas yang saat ini masih dikembangkan dan menjadi sumber pangan utama adalah padi. Padi merupakan komoditas strategis berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional, dan menjadi basis utama dalam revitalisasi pertanian ke depan. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan beras dalam periode 2005-2025 diproyeksikan masih akan terus meningkat. Kalau pada tahun 2005 kebutuhan beras setara 52,8 juta ton gabah kering giling (GKG), maka pada tahun 2025 kebutuhan tersebut diproyeksikan sebesar 65,9 juta ton GKG.

Menurut BPS Aceh Tahun 2013, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang sangat berpotensi untuk mengembangkan usahatani padi. Kecamatan Indrapuri merupakan kecamatan kedua setelah Seulimum yang mempunyai tingkat produksi padi tertinggi di Aceh Besar yaitu mencapai 36.551 ton atau 15 persen dari total keseluruhan produksi padi sawah di Aceh Besar dengan memiliki luas tanam 3.689 Ha dan luas panen 3.689 Ha.

Meskipun produksi usahatani padi di Kecamatan Indrapuri yang tergolong besar, namun permasalahan yang saat ini terjadi untuk memaksimalkan pengembangan agribisnis yaitu masih ada hal-hal yang belum terlaksana dan terkoordinasi dalam sistem yang telah dibuat dan dilaksanakan. Inilah yang sering menjadi masalah di dalam suatu daerah seperti di Kecamatan Indrapuri ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada subsistem agroinput, agroproduksi, agroindustri, agroniaga, dan penunjang dalam pengembangan agribisnis padi di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, dan untuk mengetahui strategi solusi berdasarkan permasalahan pada masing-masing subsistem dalam pengembangan agribisnis padi di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Sampel petani diambil dari beberapa desa yang berada di wilayah Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan wawancara ke beberapa petani, penjual alat dan bahan saprodi, serta penyuluh pertanian untuk mencari informasi mengenai pengembangan agribisnis padi. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006).

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

Pengolahan Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif diolah dalam bentuk persentase serta dianalisis secara deskriptif. Data kualitatif pada pengembangan agribisnis padi diinterpretasikan dengan perhitungan kuantitatif berupa bentuk skor penilaian keefektifan dan diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan pertanian, yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian (Sutisna E, 2015).

Pengertian agribisnis mengacu kepada semua aktivitas dimulai dari pengadaan, prosesing, penyaluran sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain dan saling memberikan dampak yang signifikan terhadap setiap subsistem tersebut.

Pengembangan agribisnis juga memiliki perencanaan yang harus dijalankan dengan lebih baik, sebagaimana manajemen organisasi yang lain, dalam manajemen agribisnis juga diterapkan fungsi-fungsi manajemen yang telah diterapkan di berbagai kalangan umum, yang dimulai dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian dalam perencanaan memegang peranan yang sangat penting dalam agribisnis agar usaha agribisnis tidak mengalami kegagalan (Sa'id, 2004).

Kendala pada Pengembangan Agroinput Padi

Agroinput merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan agribisnis, agroinput merupakan penyediaan sarana hulu yang mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, dalam kegiatan ini perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usahatani. Berbagai lembaga penyedia agroinput bias berupa produsen bibit, pupuk, pestisida dan alsintan beserta grosir dan pengecernya seperti KUD, kios dan sebagainya.

Pada subsistem ini ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya, informasi jaringan serta ketersediaan agroinput menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan agribisnis, adapun beberapa hal yang sering muncul dikalangan petani ialah tingginya harga sarana produksi, kelangkaan pupuk bersubsidi, dan sertifikasi benih. Dari hasil survei dilapangan, dapat dilihat beberapa penjelasan mengenai agroinput dan permasalahan di Kecamatan Indrapuri.

Harga Sarana Produksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 68/Kpts/TP.030/1/2016 tentang Harga Benih, Subsidi Benih dan Harga Eceran Tertinggi Benih mengatakan bahwa harga benih padi subsidi adalah sebesar Rp. 2.500,- per kg. Sementara harga benih di lokasi penelitian adalah Rp. 3.000,- per kg, yaitu lebih mahal dari harga yang ditentukan oleh kementerian, maka dapat dikategorikan harga benih padi di daerah penelitian ke dalam kategori mahal. Harga sarana produksi di daerah penelitian dapat dilihat di dalam tabel berikut :

Tabel 1. Perbandingan Biaya Sarana Produksi Usahatani Padi Per Hektar

No.	Sarana Produksi	Satuan	HET (Rp/Kg/Liter)	Harga di Daerah Penelitian	Selisih
1.	Benih	Kg	2500	3000	500
2.	Urea	Kg	1800	2000	200
3.	SP-36	Kg	2000	2500	500
4.	ZA	Kg	1400	1600	200
5.	NPK	Kg	2300	2500	200
6.	KCL	Kg	5500	7000	1500

Sumber : Data Primer 2015

Dari tabel diatas terlihat perbedaan harga sarana produksi antara HET dengan harga yang dijual oleh penyalur di daerah penelitian. Untuk mengatasi harga benih yang mahal, petani membuat benih turunan dari hasil panen benih subsidi yang mereka beli sebelumnya. Menurut mereka hal ini bisa mengurangi biaya agroinput. Sementara benih yang mereka gunakan untuk dijadikan benih turunan adalah benih turunan terakhir (BR). Menurut BPP Indrapuri, benih yang mereka tanam itu hasil panennya digunakan untuk konsumsi, bukan lagi sebagai benih turunan.

Selain benih, pupuk juga mengalami kenaikan harga di lokasi penelitian. Faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dan meningkatnya harga jauh di atas HET ialah karena belum dipatuhinya secara sempurna peraturan-peraturan tentang distribusi pupuk bersubsidi oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini distributor dan pengecer resmi. Meningkatnya harga pupuk urea bersubsidi jauh di atas HET dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya biaya-biaya tambahan yang diberikan pengecer karena melakukan penggantian karung pupuk ke dalam kantong-kantong plastik akibat pembelian dengan eceran. Hal ini terjadi karena pupuk urea bersubsidi yang disediakan dalam bentuk karung per zak (50 kg) sehingga membutuhkan biaya tambahan untuk kantong plastik. Selain itu pengecer juga memberikan biaya tambahan untuk transportasi karena lokasi dari kios gudang penyimpanan ke tempat petani. Berikut penuturan dari informan. *“Kami membeli dari distributor dengan harga yang sudah tinggi, sementara kami juga membutuhkan biaya tambahan lainnya pada saat dijual, angkutan juga harus dibayar. Makanya kami menaikkan harganya sedikit.”*

Sertifikasi Benih

Menurut Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (2014) mengatakan bahwa benih bersertifikat yang akan diproduksi harus berasal dari benih bersertifikat dengan kelas benih yang lebih tinggi. Jadi misalnya, petani ingin memproduksi benih sebar (BR) bersertifikat, maka yang harus ditanam adalah benih pokok (BP) bersertifikat. Dan jika petani ingin memproduksi BP bersertifikat, maka benih yang ditanam haruslah benih dasar (BD) bersertifikat.

Salah seorang penyuluh di BPP Indrapuri mengatakan bahwa para petani sebagian dari mereka menggunakan benih yang tidak bersertifikat melainkan menggunakan benih turunan. Bagi mereka benih turunan yang mereka turunkan sendiri masih bisa digunakan dan akan lebih menghemat biaya pembelian benih. Namun seperti yang kita ketahui bahwa benih tanpa sertifikat tidak mempunyai jaminan dari BPSB tentang kualitasnya. Hal ini tentu akan berpengaruh pada produksi padi selanjutnya.

“Kendalanya pada daya beli. Petani maunya harga benih yang murah. Sementara benih bersertifikat tentu harganya lebih mahal sedikit dari benih tanpa sertifikat. Jadinya mereka lebih memilih membuat benih sendiri daripada harus membeli benih subsidi,” tutur Hidayat.

Melihat keadaan ini sudah menjadi tanggung jawab dari BPSB untuk memberikan pemahaman kepada petani dalam memerhatikan kualitas benih, bukan dengan menggunakan benih yang tidak jelas kualitasnya. Benih yang berkualitas adalah benih unggul yang mempunyai sifat-sifat unggul seperti potensi hasil tinggi, cepat berbuah, tahan terhadap hama dan penyakit tertentu, tahan terhadap stres lingkungan dan sebagainya.

Kelangkaan Pupuk Subsidi

Pupuk merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan budidaya untuk membantu meningkatkan produktivitas. Namun sering terjadinya kelangkaan pupuk membuat petani kesulitan dalam bertani. Berikut tabel mengenai permintaan pupuk dan realisasi Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2. Permintaan Pupuk dan Penyediaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008-2013

Tahun	Permintaan Pupuk (Kg) dan Realisasi (Kg)		
	Kebutuhan	Penyediaan	Selisih
2008	3.203,20	2.964,67	238,53
2009	3.479,01	3.174,76	304,25
2010	5.044,19	4.419,45	624,74
2011	7.248,35	6.062,52	1185,83
2012	9.803,21	600,18	9203,03
2013	6.351,37	4.650,67	1700,7
Pertumbuhan (%)	4,59 %		13.257,08

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Aceh Besar (2014)

Pada Tabel 2 terlihat ada perbedaan antara kebutuhan dan realisasi terhadap pupuk bersubsidi. Setiap tahunnya selalu terjadi kehilangan pupuk subsidi yang disalurkan. Beberapa faktor menjadi penyebab dari kehilangan yang merugikan petani. Rikki (2009) dalam Analisis Perbedaan Harga Pembelian dan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo mengatakan bahwa permasalahan tentang distribusi pengadaan dan penyaluran pupuk bisa ditinjau dari prinsip enam tepat seperti yang dijelaskan pada Permendag No 07/M-DAG/PER/2/2009. Namun pada bagian berikut akan dijabarkan masalah yang diperkirakan mampu menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi pemerintah di Kabupaten Karo berdasarkan pelaku yang beroperasi di tingkat kabupaten :

1. Masalah RDKK. Pupuk yang sudah disalurkan oleh distributor tidak ditebus oleh petani. Adanya permintaan pupuk dari petani namun tidak melalui mekanisme (RDKK).
2. Kesulitan penjualan untuk pupuk yang rusak kemasan/bocor (5-10 karung dalam 1 truk) selama proses pengangkutan.
3. Kendala penjadwalan alokasi kepada Kelompok Tani, pupuk yang diperoleh dari distributor. Prosedur realokasi masih sangat kurang baik.
4. Kekurangan jumlah pupuk Urea karena musim tanam tiba Prosedur RDKK yang tidak sesuai.
5. Kendala kemampuan finansial dalam pembelian pupuk, Penyaluran pupuk masih belum tepat sasaran (belum sesuai RDKK).

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa hal menurut petani yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Indrapuri adalah pupuk yang ditebus oleh mereka tidak sesuai dengan kebutuhan. Terjadinya keterlambatan dalam menyalurkan pupuk sehingga pada saat mereka mengambil pupuk, kondisinya sudah mengeras. Ketika petani ingin menebus pupuk, harga pupuk melambung tinggi.

Tabel 3. Perbedaan Harga Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Indrapuri

Jenis Pupuk	Harga Kios	Harga Pengecer
NPK	Rp. 115.000,-	Rp. 150.000,-
PETROGANIK	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-
UREA	Rp. 90.000,-	Rp. 160.000,-
ZA	Rp. 70.000,-	Rp. 130.000,-
SP-36	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-

Sumber : Data Primer (2016)

Berdasarkan tabel diatas, adanya kenaikan pada harga pupuk di daerah penelitian yang begitu tinggi, hal ini disebabkan penyalur menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dan petani yang membutuhkan. Pengecer yang membeli pupuk tersebut kemudian menjual kembali kepada petani dengan harga yang tinggi. Sehingga menyulitkan bagi petani dalam membayar harga pupuk bersubsidi tersebut.

Petani hanya membutuhkan pupuk setahun dua kali, dan itu hanya pada saat masuk masa tanam. Menurut penyuluh setempat pupuk masuk setiap bulannya ke penyalur, sementara pupuk tidak dibutuhkan setiap bulannya oleh petani padi. Ada kesalahan dalam sistem distribusi yang harus diubah, sehingga tidak merugikan penyalur dan petani pun bisa mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhan. Penyalur mengeluhkan hal ini dan mereka mengatakan tidak sanggup lagi bekerjasama dengan distributor kalau sistemnya tetap seperti ini. Hal ini disampaikan oleh Helmi salah seorang pemilik UD. Intan Tani pada saat diwawancarai. Menurut Helmi, mereka para penyalur telah membahas hal ini dengan distributor untuk berhenti menyalurkan pupuk di tahun selanjutnya.

Dari beberapa hal yang menjadi masalah pada pengembangan sarana produksi ini sudah seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah. Petani berharap pemerintah mau membuat penangkar benih dari kalangan petani daerah. Diberikan pelatihan, diajarkan ilmu-ilmu dan teknik yang dapat membantu petani bisa membuat benih-benih unggul. Jangan hanya mengandalkan benih dari luar daerah. Ketidaksinambungan antara petani, penyalur dan penyuluh akan menjadikan usahatani lebih sulit dalam menghilangkan masalah sarana produksi. Harus ada kerjasama yang lebih baik untuk mengatur pupuk yang langka seperti dikatakan oleh petani, yang sebenarnya bukan karena kelangkaan melainkan sistem yang tidak sesuai. Untuk itu penyalur berharap pemerintah melalui distributor dapat mengubah sistem penjualan pupuk agar mereka tidak mengalami kerugian.

Kendala pada Pengembangan Agroproduksi Padi

Dalam melakukan budidaya pertaniannya petani sering mengalami masalah dalam hal budidaya. Permasalahan budidaya pertanian tidak hanya terjadi pada permasalahan munculnya organisme pengganggu tanaman (OPT) namun terjadi pada permasalahan bahan tanam, pemeliharaan, penanaman, iklim dan lain sebagainya. Petani umumnya tidak mengetahui bagaimana cara budidaya yang benar dan umumnya mereka hanya asal tanam saja tanpa memperhatikan permasalahan bahan tanam yang baik untuk budidayanya, pemeliharaan, penanaman, iklim dan lain sebagainya (Zaki, 2011).

Selanjutnya, kerugian ekonomi yang timbul juga masih akan dilihat dari nilai ekonomi produk yang dihasilkan tanaman. Tanaman dengan nilai ekonomi tinggi akan dilindungi dari serangan hama dengan lebih intensif daripada tanaman yang nilainya rendah. Kerugian ekonomi dengan demikian didefinisikan berdasar kepada sifat-sifat jasad pengganggu, sifat-sifat tanaman maupun sitindak atau interaksi antara keduanya beserta lingkungan sekitar (biologi dan ekologi); dan sifat sosio-ekonomik tanaman maupun usaha taninya bagi si penanam (Edi Martono, 2000).

Berdasarkan hasil survei, beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengembangan budidaya padi adalah sebagai berikut :

Pola Tanam

Pertanian yang berkembang saat ini masih didominasi cara pertanian konvensional dengan menggunakan pupuk kimia. Begitupun pemberantasan atau mengatasi hama dan penyakitnya. Jika sistem bertani seperti ini dipertahankan, dikhawatirkan akan semakin memperburuk kesuburan tanah pertanian, sehingga akan menurunkan hasil panen petani.

Pola tanam tradisional masih juga diterapkan oleh petani setempat walaupun penyuluh telah menyarankan untuk berpindah ke sistem tanam legowo. Padahal hasilnya sudah sangat jelas. Berdasarkan informasi dari penyuluh terhadap petani yang menggunakan sistem legowo

hasil panennya meningkat hingga 20%. Selain tingkat produksi yang meningkat, pemberantasan hama juga terasa lebih mudah.

Adanya jarak antara satu tanaman ke tanaman yang lainnya menyulitkan hama tikus untuk menyerang tanaman, dibuatnya jarak antara dinding dengan tanaman agar hama keong emas tidak bisa masuk pada saat musim hujan. Perlakuan ini telah dirasakan oleh petani yang menggunakan sistem jarak tanam legowo.

Tabel 4. Teknologi Pengolahan Lahan di Kecamatan Indrapuri

Aplikasi Teknologi	Persentase (%)
Alat Pembajakan	
Traktor	100 %
Ternak	-
Sistem Jarak Tanam	
Legowo	60 %
Tradisional	40 %
Pemakaian Input	
Urea	100 %
SP36	82 %
NPK	40 %
ZA	25 %
Organik	100 %
Pestisida	100 %

Sumber : Data Primer (diolah) 2016

Berdasarkan tabel diatas, terlihat penggunaan sistem jarak tanam legowo hanya dilakukan oleh 60 % petani. Semenara sisanya masih melakukan sistem tradisional. Hal ini masih terjadi dikarenakan belum adanya kepercayaan terhadap ilmu yang diberikan oleh penyuluh. *Kayem, lazim, biasa*. Artinya cara mereka bertani masih menggunakan sistem orang-orang terdahulu. Apa yang orang tua mereka lakukan, tetap mereka ikuti.

Penggunaan sistem tanam legowo telah dirasakan oleh 60 % petani. Berdasarkan hasil survei dan wawancara, beberapa hal yang menyebabkan mereka ingin berganti ke sistem ini adalah penggunaan bibit yang irit, cara penanamannya mudah, pemupukan yang tidak sulit dilakukan, adanya akses jalan yang terbuat di dalm lahan sehingga tidak merusak tanaman, dengan adanya sistem jarak tanam ini menyulitkan hama tikus menyerang karena tidak ada tempat yang sempit.

Sementara pada penanaman sistem tradisional, salah satu faktor yang menjadi kendala adalah hama dan penyakit sehingga mempengaruhi pada umur tanam bibit. Untuk mengatasi serangan keong mas, umur tanam bibit baru bisa dipindahkan setelah masa 18 hari penyemaian. Litbang Pertanian (2010) mengatakan bahwa salah satu faktor penting untuk mencapai produktivitas tinggi tanaman padi adalah tanam bibit muda (10–15 hari). Dengan catatan, rekomendasi itu tidak dianjurkan untuk daerah endemik keong emas. Pada umur tanam 10-15 hari akan lebih mudah diserang oleh hama keong emas karena keadaan tanaman yang masih belum kuat. Sementara itu, serangan hama keong emas di daerah penelitian sangatlah tinggi, maka petani dianjurkan untuk lebih menggunakan masa tanam di atas 18 hari agar tanaman lebih kuat. Untuk mencegah serangan hama, para petani terpaksa menahan umur tanam lebih lama. Akibatnya, produksi padi berkurang hingga 15 %. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya serangan hama adalah pola tanam yang salah, musim tanam yang tidak serentak, serta pengendalian hama yang tidak tepat.

“Kalau petani tidak menanam diumur 18 hari, hama keong emas ini akan sangat mudah menyerang. Tetapi, akibat dari cara ini adalah turunnya produksi padi sebesar 15 % pada setiap tanamnya”. Hidayat (Penyuluh)

Teknologi usahatani yang lebih efisien dan ekonomis belum dipraktekkan oleh petani di daerah ini disebabkan karena mereka belum mempunyai pengetahuan mengenai teknologi inovatif yang tersedia. Hal ini tidak terlepas dari belum efektifnya pelaksanaan penyuluhan pertanian di daerah ini. Petani di beberapa desa dalam penelitian ini sebagian besar mengaku tidak pernah mendapatkan bimbingan dari penyuluh di lapangan. Menurut mereka penyuluh hanya mengunjungi pengurus kelompok untuk urusan administrasi, memberikan informasi dengan ceramah tetapi tidak mempraktekannya. Banyak teknik budidaya yang belum mereka pahami, seperti cara pemupukan, waktu pemupukan dan pengendalian hama yang baik.

Kendala pada Pengembangan Agroindustri Usahatani Padi

Salah satu kendala dalam pengembangan agroindustri di Indonesia adalah kemampuan mengolah produk yang masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar komoditas pertanian yang diekspor merupakan bahan mentah dengan indeks retensi pengolahan sebesar 71-75%. Angka tersebut menunjukkan bahwa hanya 25-29% produk pertanian Indonesia yang diekspor dalam bentuk olahan. Kondisi ini tentu saja memperkecil nilai tambah yang diperoleh dari ekspor produk pertanian, sehingga pengolahan lebih lanjut menjadi tuntutan bagi perkembangan agroindustri di era global ini. Teknologi yang digolongkan sebagai teknologi agroindustri produk pertanian begitu beragam dan sangat luas mencakup teknologi pascapanen dan teknologi proses. Untuk memudahkan, secara garis besar teknologi pascapanen digolongkan berdasarkan tahapannya yaitu, tahap sebelum pengolahan, tahap pengolahan dan tahap pengolahan lanjut (Soewono L, 2005). Perlakuan pasca panen tahap awal meliputi, pembersihan, pengeringan, sortasi dan pengeringan berdasarkan mutu, pengemasan, transport dan penyimpanan, pemotongan/pengirisan, penghilangan biji, pengupasan dan lainnya.

Agroindustri tanaman padi dalam hal ini ditekankan kepada peningkatan mutu pascapanen. Padi setelah diproses menjadi beras merupakan bahan pangan pokok hampir seluruh penduduk Indonesia. Pada umumnya padi ditanam di lahan basah secara monokultur. Dalam meningkatkan nilai tambah padi, penanganan pascapanen yang tepat merupakan hal yang penting karena kualitas produk akan menentukan harga yang akan diterima baik oleh petani maupun pedagang, disamping laju perubahan harga padi dan beras secara musiman.

Petani di Kecamatan Indrapuri saat ini belum memiliki tempat penyimpanan gabah yang cukup sehingga hasil panen yang mereka miliki tidak bisa dikeringkan untuk meningkatkan kualitas gabah. Ketakutan akan membusuknya gabah hasil panen mereka membuat para petani setempat langsung menjual ke tengkulak dalam hal ini kilang padi dalam kondisi Gabah Kering Panen (GKP). Kelemahan dan kendala petani saat ini adalah tidak mengetahui mengenai *value added* dari gabah yang mereka hasilkan. Jika mereka mampu mengolah padi yang baik dan benar akan dapat menghasilkan beras yang berkualitas tinggi sehingga dapat menaikkan harga beras. Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) telah mengeluarkan ketentuan tentang standar kualitas padi yang baik, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Standar Kualitas Padi Menurut BULOG

	GKL	GKD	GKP	GKG
Kelembaban maksimal	26%	19%	16%	14%
Kotoran	10%	8%	6%	3%
Biji muda (hijau)	15%	10%	9%	5%
Biji pecah	3%	3%	3%	3%
Biji coklat	3%	3%	3%	3%

Sumber :Badan Urusan Logistik BULOG (2014)

Keterangan:

GKL : Gabah Kering Lapang

GKD : Gabah Kering Desa

GKP : Gabah Kering Panen

GKG : Gabah Kering Giling

Berdasarkan tabel diatas, konversi dari GKP ke GKG akan menurunkan kelembaban maksimal sebanyak 2%, kotoran 3%, biji muda 5%, biji pecah 3% dan biji coklat 3%. Melihat selisih ini tentu kualitas gabah akan lebih baik dan secara pasti akan menaikkan nilai tambah bahkan menaikkan nilai jual.

Berdasarkan hasil survei, perlu adanya sosialisasi terhadap petani terkait bagaimana mengolah gabah untuk menambah keuntungan petani. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelajaran penting bagi petani di Kecamatan Indrapuri pada khususnya, pada petani di Aceh pada umumnya untuk membantu melaksanakan swasembada pangan yang akan diproyeksikan pada tahun 2025 mendatang.

Kendala pada Pengembangan Agroniaga Padi

Pada pertanian konvensional, petani menjual hasil panen kepada pasar atau kepada tengkulak. Bagi mereka dibandingkan harus dijual ke BULOG, lebih baik dijual langsung ke tengkulak karena harganya lebih tinggi. Berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP) tahun 2015, harga GKP Rp 3.700,- per kg sementara harga yang dijual kepada tengkulak bisa mencapai Rp. 4.700,- per kg. Harga yang ditawarkan oleh tengkulak bisa lebih tinggi Rp. 800,- per kg, maka dari itu petani lebih memilih menjualnya kepada tengkulak dibandingkan dengan BULOG.

Tengkulak kadang berkonotasi negatif, karena kemampuannya menekan petani dalam hal menentukan harga komoditas, tapi kenyataannya petani begitu dekat dengan mereka, dalam mendapatkan informasi harga dan mereka adalah penguasa pasar sebenarnya di lapangan. Ini hal yang ditakutkan, bahkan sudah sering terjadi terjadi. Ketika harga padi anjlok, mereka mampu menekan harga serendah-rendahnya kepada petani untuk menjual hasil panen. Sementara petani dengan terpaksa juga harus menjual hasil panen dengan harga murah. Harga termurah yang pernah ditawarkan oleh tengkulak sebesar Rp. 3.500,- per kg. Jika mereka tidak menjualnya padi akan membusuk dan tidak bisa digunakan lagi. Tentu akan menjadi kerugian besar buat mereka. Daripada mendapat kerugian, mau tidak mau petani harus menjualnya dengan harga murah.

Saat musim hujan, petani menjadi kesusahan karena keadaan gabah yang sulit untuk kering. Ketika padi dalam keadaan basah, tengkulak sudah pasti membeli hasil panennya dengan harga yang lebih rendah. Jika hasil panennya basah, harga jualnya bisa turun hingga mencapai Rp. 4.000,00 per kg. Setiap kelompok tani hanya menggunakan gudang dari rumah ketua kelompoknya masing-masing untuk menyimpan hasil panen. Buruknya adalah gabah ini tidak mampu disimpan dalam waktu yang lama dan banyak karena mengingat gudang yang dijadikan tempat penyimpanan sangatlah kecil. Jadi mereka harus bisa menjual gabah dengan cepat sebelum pasokan gabah lainnya masuk ke dalam gudang. Selain itu belum adanya lantai jemur sehingga menyulitkan petani untuk mengeringkan hasil panen dalam waktu yang cepat.

Kendala Pengembangan Agropenunjang Padi

Subsistem agropenunjang mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan empat subsistem lainnya dalam kegiatan agribisnis. Peranan dan hubungan antara lembaga penunjang dengan kelompok tani di Kecamatan Indrapuri masih kurang baik. Oleh karena itu, perlu strategi yang dapat memecahkan masalah tersebut. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam agropenunjang adalah sebagai berikut :

Permodalan

Petani padi di Kecamatan Indrapuri yang menghadapi permasalahan dalam kemampuan permodalan. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel 1 (hal 29) di atas, menginformasikan bahwa

sekitar 70% responden mengeluarkan biaya sendiri untuk berproduksi komoditas padi, sementara 30% petani menggunakan pinjaman kredit non bank seperti pada kerabatnya bahkan ada yang meminjam melalui rentenir. Hal ini dikarenakan para petani lebih menyukai cara yang praktis untuk mendapatkan modal sebagai kegiatan bertani, serta untuk kehidupan sehari-hari tanpa memikirkan bunga yang lebih besar jika meminjam kepada rentenir.

Mereka cenderung tidak melakukan pinjaman kepada Bank, karena proses pencarian dana yang amat sulit dan membutuhkan waktu yang lama selain itu bank juga memerlukan jaminan jika hendak memberikan pinjaman kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mears (1978) dalam Supriatna (2002) yang menyatakan bahwa petani padi di Indonesia sangat membutuhkan kredit untuk tujuan produksi, belanja hidup sehari-hari dan pertemuan-pertemuan sosial. Kepemilikan lahan usaha yang sempit, lapangan pekerjaan yang terbatas diluar musim tanam, dan pemborosan menyebabkan banyak petani tidak dapat mengelola hidup dari satu panen ke panen lainnya tanpa adanya pinjaman.

Kelembagaan

Kurangnya permodalan ini dirasakan oleh sebagian besar petani di kawasan ini. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kelembagaan permodalan pedesaan yang mampu memberikan kredit usahatani yang cukup dengan bunga rendah. KUD yang pernah berkembang di daerah ini dan diharapkan dapat membantu semuanya sudah tidak aktif lagi. Untuk memenuhi kebutuhan modal usahatani ini, petani lebih banyak meminjam kepada perorangan, terutama kerabat dekat, bahkan hingga kepada pengusaha kilang padi berdasarkan kepercayaan dalam jumlah yang terbatas.

Penyuluhan

Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi penunjang dalam hal ini adalah mengenai penyuluhan pertanian dan modal usaha. Menurut salah seorang petani, mereka mengikuti penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluh Pertanian sebanyak dua kali dalam setahun. Para petani diundang untuk datang ke Badan Penyuluh Pertanian (BPP) yang biasanya diwakili oleh para ketua kelompok tani karena banyak dari beberapa petani tidak memiliki kendaraan untuk bisa ikut penyuluhan yang diberikan di kantor. Penyuluhan yang diberikan biasanya dilakukan sebelum para petani turun sawah untuk memulai menanam padi, pemupukan, hingga penanganan pascapanen.

Penyuluhan yang diberikan adalah mengenai tentang bagaimana cara budidaya yang baik dan benar. Selain itu, penyuluh juga akan memberikan beberapa informasi terbaru mengenai pengembangan-pengembangan pertanian khususnya usahatani padi. Menurut salah seorang penyuluh, beberapa program yang diberikan yaitu intensifikasi peningkatan produksi, rehabilitasi saluran, dan perluasan areal sawah. Pada saat para petani akan turun sawah, para penyuluh ikut datang mengontrol dan mempraktekkan langsung program-program kepada petani. Ini dilakukan agar petani mampu menerima dengan mudah program yang diberikan oleh penyuluh.

Dalam hal penyuluhan, para petani mengatakan bahwa program-program yang diberikan bisa diterima, dan mudah dimengerti untuk dipraktekkan. Penyuluhan diberikan sebanyak 12 kali dalam sekali tanam atau sekitar 24 kali dalam setahun. Bagi para penyuluh, yang menjadi masalah dalam hal ini yaitu sulitnya mengajak para petani untuk ikut partisipasi dalam penyuluhan untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan terbaru. Keluhan yang dirasakan oleh penyuluh adalah ketika mereka datang untuk memberikan penyuluhan tetapi para petani beranggapan bahwa kedatangan mereka untuk memberikan para petani modal usaha atau bantuan lainnya yang berbentuk material untuk mereka. Padahal penyuluh datang untuk memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang baru dalam usahatani padi yang seharusnya itu menjadi modal bagi petani untuk mengembangkan usahatani mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan agribisnis padi di Kecamatan Indrapuri Kabupaten mengalami kendala pada subsistem agribisnis. Oleh karena itu dapat disimpulkan sebagai berikut : Kendala yang dihadapi oleh petani meliputi : Mahalnya harga sarana produksi, belum terjaminnya sertifikasi benih, kurangnya kerjasama antara petani, penyuluh dan penyalur; Pola tanam yang belum baik; Permasalahan modal dan penyuluhan yang belum baik. Banyak teknik budidaya yang belum mereka pahami.

Strategi solusi untuk menanggapi kendala pengembangan agribisnis dilihat dari hasil survei di lokasi penelitian, maka hal-hal yang dapat dilakukan adalah : Pembayaran pupuk bersubsidi oleh petani dengan tepat; Perlu adanya perubahan pola tanam agar dapat mengurangi serangan hama dan penyakit; Pemda perlu mengembangkan usaha perbenihan (benih komersial) berdasar komoditas unggulan masing-masing daerah; Untuk menangani masalah harga jual gabah. hal yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti menyeimbangkan harga jual BULOG dengan harga jual; Untuk mengatasi kendala permodalan dan kelembagaan, kelompok tani harus bangun untuk mengelola kembali koperasi yang sudah tidak aktif lagi untuk membantu permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Adiwilaga. 1982. Ilmu Usaha Tani. Alumni. Bandung
Soekartawi. 2001. *Agribisnis. Teori dan Aplikasinya*. Rajawali Pers. Universitas Brawijaya. Jakarta
- Badan Litbang Pertanian. 2012. <http://www.litbang.deptan.go.id>. Diakses pada 02 Februari 2015
- Davis, John H., Ray A. Goldberg. 1957. *A Concept of Agribusiness*. Harvard Business School, Boston.
- Gumbira, Sa'id, dan A. Harizt Intan. 2004. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Kartasapoetra, A.G. 1991. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Makalah Sistem Agribisnis. www.scribd.com/doc/55460873/Bahan-Makalah-Sistem-Agribisnis-2011. Diakses pada 02 Februari 2015
- Mardikanto, Totok. 1994. *Dasar-dasar Teori Penyuluhan Pertanian*. UNS Press. Surakarta.
- Mears, L. (1978). *Problems of Supply and Marketing of Food in Indonesia in Repelita III*. Jakarta. BIES.
- PERHEPI. 2011. *Menggalang Sinergi Sistem Agribisnis: suatu Tinjauan Institusional*. Makalah. Sulawesi Utara.
- Pengertian Penyuluhan Pertanian. 2014. <http://pemudapelita.wordpress.com>. Diakses pada 02 Februari 2015
- Ricketts, Cliff., Omri Rawlins. 2001. *Introduction to Agribusiness*. Delmar, Thomson Learning. US.

- Roy, Ewell P. 1980. *Exploring Agribusiness*. Danville.
- Sadikin M. 2001. *Pengembangan Sektor Pertanian (Penanganan Komoditi Unggul)*. UGM Press. Jakarta.
- Saragih.B. 2010. *Kumpulan Pemikiran Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor
- Simamora, Bilson. 2004. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sjarkowi, F. dan M. Sufri. 2004. *Manajemen Agribisnis*. Palembang: CV. Baldal Grafiti Press.
- Slamet. 2000. *Agrikultur*. LPN-IPB. Bogor.
- Sofa, 2008. *Karakteristik Anak Usia SD*. <http://kl.wordpress.com>. Diakses tanggal 25 Januari 2008
- Subiakto Tjakrawerdya, 1996. *Pengembangan KUD di Bidang Agribisnis Dalam Era Perdagangan Bebas Abad Ke-21*. Paper Dalam Seminar Peringatan 50 UGM Yogyakarta.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS
- Tatuh, Jen., Hanny Anapu. 2000. Tentang Sistem Agribisnis. Dalam Djohan D., dan Bayu Krisnamurthi (Ed). *Membangun Koperasi Pertanian Berbasis Anggota*. LSP2I, Jakarta.